



SALINAN

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
INSTANSI PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk mendorong pengusulan unit kerja/satuan kerja di pemerintah daerah, perlu melakukan penyesuaian persyaratan pengusulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan Bab II dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 444

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Rejeki Nawangsasih

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN
2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
INSTANSI PEMERINTAH

BAB II
PENGAJUAN UNIT KERJA/SATUAN KERJA BERPREDIKAT MENUJU
WBK/WBBM

A. Syarat Pengusulan Zona Integritas

Berdasarkan laporan hasil evaluasi TPI terhadap unit kerja/satuan kerja yang membangun ZI, pimpinan instansi pemerintah mengusulkan kepada TPN Kementerian untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Persyaratan pengusulan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Syarat Pengusulan ZI

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal “WTP”	
	Predikat SAKIP minimal “B”	Predikat SAKIP minimal “BB”
	<ul style="list-style-type: none">Indeks RB Minimal “CC” untuk Pemerintah DaerahIndeks RB Minimal “B” untuk kementerian/lembaga	<ul style="list-style-type: none">Indeks RB Minimal “B” untuk Pemerintah DaerahIndeks RB Minimal “BB” untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan dari APIP/BPK 100%	
	Kepatuhan Penyampaian LHKAN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B”	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB”

Dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan aksi prioritas Stranas PK sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Bab II Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, pada unit/ satuan kerja berikut:

- a. rumah sakit umum daerah;
- b. dinas kependudukan dan catatan sipil;
- c. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap;
- d. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan; dan
- f. unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.

tersebut tetap dapat melakukan pembangunan Zona Integritas dan mengajukan pengusulan ke TPN meskipun masih dalam proses pemenuhan syarat sebagaimana disebutkan pada Tabel 5. Syarat Pengusulan ZI.

Selanjutnya Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan usulan seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan WBK/WBBM dalam satu surat kepada Menteri c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan selaku Penanggung Jawab TPN melalui Surat Pengajuan Evaluasi (contoh sebagaimana gambar 6 di bawah ini).

Gambar 6. Surat Pengajuan Evaluasi

Nomor	: (Nomor surat)	(Tanggal pengajuan)
Lampiran	:	
Hal	: Pengajuan Unit kerja/satuan kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
Kepada Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Jakarta		
<p>Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XXX Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di (Nama Instansi Pemerintah). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun XXXX oleh Tim Penilaian Internal (TPI) ZI (Nama Instansi Pemerintah), kami mengusulkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. (Nama Unit kerja/satuan kerja)/ (predikat WBK atau WBBM)2. (Nama Unit kerja/satuan kerja)/ (predikat WBK atau WBBM)3. dst. <p>sebagai calon unit kerja/satuan kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit kerja/satuan kerja yang diusulkan tersebut.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Pimpinan Instansi Pemerintah</p> <p style="text-align: right;">(nama) NIP.</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1.		

Surat Pengajuan Evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagaimana di atas dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, bahwa semua data dan informasi yang disampaikan dari unit kerja/satuan kerja yang diajukan untuk mendapat predikat menuju WBK/WBBM telah sesuai dengan fakta/kondisi yang sebenarnya (contoh sebagaimana pada gambar 7 di bawah ini).

Gambar 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

<p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA PENDUKUNG</p> <p>Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Jakarta</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (Nama jelas) Jabatan : (Pimpinan instansi pemerintah) Alamat : (Alamat instansi pemerintah)</p> <p>Sehubungan dengan pengusulan unit kerja/satuan kerja sejumlah unit kerja/satuan kerja dalam evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 20...., dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Syarat unit kerja/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;2. Data dukung pengusulkan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. <p>Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,kami bersedia ditinjau Kembali terkait pengusulan satuan kerja/unit kerja kami dalam Pembangunan zona integritas</p> <p>Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.</p> <p style="text-align: right;">....., tanggal..... Yang membuat pernyataan (Instansi pemerintah)</p> <p style="text-align: right;">(Nama lengkap) (Jabatan pimpinan instansi pemerintah)</p>
--

Pengajuan surat usulan kepada TPN dilakukan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Mei atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh TPN (batas waktu pengajuan surat usulan akan diumumkan setiap tahun oleh TPN). Pengumuman tersebut dapat diketahui melalui laman media resmi Kementerian PANRB ataupun media lainnya.

B. Pelaksanaan Evaluasi Menuju WBK Secara Mandiri

Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan evaluasi Zona Integritas secara mandiri bagi unit kerja/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBK. Predikat Menuju WBK hasil evaluasi secara Mandiri setara dengan predikat Menuju WBK hasil evaluasi TPN. Dengan demikian, unit kerja/satuan kerja berpredikat Menuju WBK hasil evaluasi secara mandiri dapat diusulkan untuk mendapat predikat Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan bagi instansi pemerintah yang dapat melaksanakan evaluasi WBK secara mandiri ditetapkan oleh Menteri.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS